



# **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

---

**BAPPEDA KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun 2021 yang merupakan bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan dokumen RKT Bappeda Kota Banda Aceh merupakan bagian dari upaya perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Government*) khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dan TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen RKT Tahun 2021. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terkait, khususnya aparatur Bappeda Kota Banda Aceh, sehingga penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh dapat berjalan dengan baik dan target-target pembangunan kota dapat tercapai sesuai dengan harapan.

**Banda Aceh, Januari 2021**  
**Kepala Bappeda Kota Banda Aceh**

**WERI, SE, MA**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19640525 198903 1 026**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Gambaran Umum BAPPEDA.....	1
1.2. Struktur Organisasi.....	1
1.3. Tujuan Penyusunan RKT.....	10
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS</b> .....	11
2.1. Visi dan Misi.....	11
2.2. Tujuan, Sasaran dan Program.....	13
<b>BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA</b> .....	22
3.1. Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2021.....	22
3.2. Penetapan Kinerja.....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	36
<b>LAMPIRAN:</b>	
<b>A. Lampiran Rencana Strategis (RS) Tahun 2017-2020</b>	
<b>B. Lampiran Rencana Strategis (RS) Tahun 2021-2022</b>	
<b>C. Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021</b>	
<b>D. Struktur Organisasi</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum BAPPEDA Kota Banda Aceh**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan lembaga yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Bappeda untuk dapat menyusun dokumen perencanaan di daerah, baik untuk perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun rencana tahunan. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan perencanaan daerah, dibutuhkan suatu dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang digunakan sebagai pedoman dalam mengawal pencapaian seluruh target kinerja yang telah direncanakan sehingga seluruh kegiatan penyusunan rencana pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, RKT merupakan tolok ukur tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah. RKT juga menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 bagi Kepala Bappeda kepada Walikota.

RKT Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2021 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh Bappeda pada tahun 2021. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen ini merujuk pada Renja Bappeda tahun 2021 dan Renstra Bappeda tahun 2017 – 2022. RKT merupakan dokumen penting untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan Bappeda Kota Banda Aceh dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya di tahun 2021.

### **1.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Bappeda Kota Banda Aceh diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. Berikut adalah rincian susunan struktur organisasi Bappeda Kota Banda Aceh.

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - f. Kepala Subbagian;
  - g. Kepala Subbidang;
  - h. UPTB GIS; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Sekretariat, membawahi:
  - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
  
- (3) Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi, membawahi:
  - a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Subbidang Pengintegrasian dan Harmonisasi Program; dan
  - c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
  
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan, membawahi:
  - a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - b. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan; dan
  - c. Subbidang Kelembagaan dan Keistimewaan.
  
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
  - a. Subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Subbidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi; dan
  - c. Subbidang Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan.
  
- (6) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:

- a. Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan;
- b. Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanggulangan Bencana; dan
- c. Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

### 1.2.1 Susunan Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Bappeda Kota Banda Aceh di dukung oleh pegawai, baik yang berstatus PNS maupun Kontrak (Non PNS). Per Januari 2021, jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebanyak 65 orang. 48 orang diantaranya berstatus PNS sedangkan 17 lainnya berstatus pegawai Kontrak. Bappeda memiliki pegawai yang cukup berpengalaman yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, terlihat dari level pangkat dan golongan PNS yang ada. Jumlah terbesar PNS Bappeda berada pada golongan III/d yaitu sebanyak 20 orang, diikuti dengan golongan IV/a dan III/c masing-masing sebanyak 12 dan 5 orang. Komposisi pegawai Bappeda Kota Banda Aceh berdasarkan golongan dan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Bappeda Banda Aceh Berdasarkan Golongan dan Status Kepegawaian pada Tahun 2021**

No	Golongan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	Orang
	<b>P N S</b>			
1	IV/d	-	-	-
2	IV/c	-	-	-
3	IV/b	2	1	3
4	IV/a	4	8	12
5	III/d	7	13	20
6	III/c	3	2	5
7	III/b	1	3	4
8	III/a		1	1
9	II/d	-	-	-
10	II/c	1	1	2
11	II/b	-	-	-
12	II/a	1	-	1
13	I/d	-	-	-
14	I/c	-	-	-
15	I/b	-	-	-
16	I/a	-	-	-
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>48</b>
	<b>Non PNS</b>			
	Pegawai Kontrak	11	6	17
	<b>Jumlah PNS + Non PNS</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>65</b>

Dari segi pendidikan, pegawai Bappeda rata-rata memiliki jenjang pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan ini menjadi salah satu faktor penunjang organisasi Bappeda di dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Jumlah PNS Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak berada pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 20 orang, diikuti oleh tingkat S2 sebanyak 18 orang. Tingkat pendidikan terendah adalah SLTP dengan 1 orang pegawai dan tertinggi pada S3 yaitu sebanyak 1 orang. Sementara 11 dari total 17 pegawai NON PNS pada Bappeda Kota Banda Aceh memiliki pendidikan setingkat S1. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Bappeda rata-rata memiliki pendidikan tinggi yang sangat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan di Bappeda sebagai sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh.

**Tabel.1.2.**  
**Jumlah Pegawai Bappeda Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah NON PNS
1	S 3	1	-
2	S 2	18	2
3	S 1	20	11
4	D IV	1	-
5	D III	3	-
6	SLTA	4	3
7	SLTP	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>17</b>

Aspek penunjang pelaksanaan tugas lainnya adalah sarana dan prasarana. Pada Tahun 2021, Bappeda Kota Banda Aceh telah memiliki Aset yang cukup memadai. Bappeda memiliki bangunan gedung seluas 520,75 m<sup>2</sup>, dengan luas lahan seluas 1.451 m<sup>2</sup>. Bappeda juga didukung dengan total 885 peralatan dan mesin seperti kendaraan dinas, genset, computer, printer dan peralatan kerja lainnya. Selain itu, Bappeda juga telah memiliki jaringan solar panel yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung gerakan hemat energi dan konsep Banda Aceh sebagai *Green City*. Jenis sarana dan prasarana beserta konversi nilai aset Bappeda Kota Banda Aceh terlihat pada tabel 1.3. berikut:

**Tabel 1.3.**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021**

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	TANAH	1	6.336.087.000
2	PERALATAN DAN MESIN	885	4.248.083.720
3	BANGUNAN GEDUNG	4	3.546.148.000
4	INSTALASI JARINGAN	2	123.601.000
5	ASSET TETAP LAINNYA	3	420.000
Jumlah		<b>895</b>	<b>14.254.339.720</b>

### 1.2.2 Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Berikut adalah uraian tugas, fungsi dan kewenangan Bappeda beserta seluruh jajarannya, seperti diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh

Untuk melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dukungan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Kewenangan:

- a. menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;

- d. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan;
- e. melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah, berdasarkan rumusan hasil musrenbang;
- f. mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran melalui tim anggaran;
- g. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui tim anggaran;
- h. meneliti dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah melalui tim anggaran;
- i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah; dan
- j. melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan.

▪ **Tugas dan Fungsi Kepala Bappeda**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan.

▪ **Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi**

Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan**

Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan

- pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan kebijakan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.3 Tujuan Penyusunan RKT**

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2017-2022. Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 adalah:

- Sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2021; dan
- Sebagai bahan dan salah satu dasar acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **2.1 Visi dan Misi**

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan oleh OPD untuk menentukan arah dan tujuan serta strategi organisasi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dan potensinya serta mempertimbangkan kendala dan hambatan yang dihadapi. Rencana strategis organisasi pemerintahan berorientasi pada hasil dan berjangka waktu 5 (lima) tahun serta merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis sosial, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana strategis suatu daerah menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan provinsi dan nasional, sehingga tercipta keharmonisan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah. Namun demikian diperlukan adanya sistem perencanaan desentralisasi yang menjangkau kebutuhan riil masyarakat yang kemudian dipadukan dengan program pemerintah. Dengan adanya paradigma perencanaan tersebut, maka setiap daerah diberikan kebebasan untuk menentukan arah pembangunannya berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Hal inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk visi dan misi pembangunan.

##### **2.1.1 Visi**

Perumusan Visi dan Misi merupakan langkah penting dalam proses perencanaan strategis. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan yang lebih baik, serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Visi menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan.

Bappeda Kota Banda Aceh, sesuai dengan arahan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mendukung konsep Visi Kota Banda Aceh dalam perencanaan strategisnya. Visi Kota Banda Aceh periode 2017 – 2020 yaitu **“Terwujudnya Kota Banda Aceh**

**gemilang dalam bingkai Syariah”**, mencerminkan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh dalam jangka menengah. Dalam Visi tersebut terdapat 2 (dua) kata kunci yaitu “GEMILANG” dan “BINGKAI SYARI’AH.” Gemilang memiliki makna menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan terpandang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender sedangkan Bingkai Syariah menunjukkan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan dilakukan dalam bingkai-bingkai Syariat Islam. Bappeda Kota Banda Aceh dalam uraian rencana strategisnya berperan serta mendukung pencapaian Visi tersebut, tentunya sesuai tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan.

### **2.1.2 Misi**

Sebagai upaya perwujudan Visi Kota Banda Aceh, maka perlu diuraikan kedalam berbagai rumusan Misi Kota Banda Aceh. Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Misi Kota Banda Aceh terdiri dari 7 Misi, yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.  
Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai Syariat Islam.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.  
Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, dan membudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan pendapatan masyarakat yang berdampak kepada peningkatan PAD melalui kebijakan dan strategi yang efektif sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Misi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik yang dicapai melalui kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan, serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi, system informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian kelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkan rasa aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuh kembang anak yang baik.

## **2.2 Tujuan, Sasaran dan Program**

### **2.2.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan tidak harus

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sesuai tupoksi, Bappeda mendukung pelaksanaan Misi ke-5 (Lima) dalam RPJMD Kota Banda Aceh tahun 2017 – 2022, yaitu **meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**. Untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 adalah **Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif**.

### 2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dimana dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan tertentu secara berkelanjutan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh periode Tahun 2017-2022. Adapun sasaran strategik yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kota Banda Aceh adalah **Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif**.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tujuan, sasaran, beserta indikator dan target yang ingin dicapai Bappeda pada periode 2017 – 2022.

**Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif.  Indikator: Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan dokumen perencanaan Kota	1.1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1.1. Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	76% (140 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	78% (144 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	80% (148 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	82% (151 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	84% (155 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)
		1.1.2. Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)	-	-
		1.1.3. Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100% (44 OPD)				
		1.1.4. Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	65% (13 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	70% (14 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	75% (15 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	80% (16 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	85% (17 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)
	1.1.5. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	33% (90 Usulan dari 270 Usulan)	34% (92 Usulan dari 270 Usulan)	35% (95 Usulan dari 270 Usulan)	-	-	

Sesuai tampilan pada tabel 2.1 diatas, indikator dan target kinerja Bappeda Kota Banda Aceh mengalami perubahan pada tahun 2021 – 2022, dari 5 (lima) menjadi 3 (tiga) target kinerja sasaran. Hal ini akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Akibat terbitnya kedua peraturan tersebut, seluruh OPD diwajibkan untuk memutakhirkan nama program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga terjadi perubahan struktur dukungan program terhadap target sasaran pada Bappeda Kota Banda Aceh, khususnya disisa 2 (dua) tahun terakhir masa perencanaan jangka menengah Kota Banda Aceh yaitu 2021 – 2022. Jumlah program strategis Bappeda yang sebelumnya berjumlah 7 program, berkurang menjadi 3 program sesuai nomenklatur baru, yang berdampak pada berkurangnya target indikator sasaran yang dapat di dukung dan kegiatan diuraikan hingga level sub kegiatan.

### **2.2.3 Program Kerja**

Bappeda Kota Banda Aceh menyusun program dan kegiatan dalam RKT dengan memperhatikan dokumen Renstra tahun 2017-2022 serta berbagai peraturan yang berlaku. Adapun program kerja Bappeda, akibat adanya perubahan nomenklatur di tahun 2021, dijabarkan dalam 2 (dua) periode yaitu periode 2017 – 2020 dan periode 2021 – 2022, sebagai berikut:

#### **Program dan Kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2020, sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006:**

##### **1. Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik.
- 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
- 1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman.
- 1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

- 1.9. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang.
- 1.10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

## **2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- 2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

## **3. Peningkatan Disiplin Aparatur**

- 3.1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi.
- 3.2. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.
- 3.3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

## **4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

### **Program/Kegiatan Urusan Wajib:**

#### **1. Pengembangan Data dan Informasi**

- 1.1. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.
- 1.2. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
- 1.3. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- 1.4. Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS).
- 1.5. Penyusunan Buku Tinjauan Perekonomian dan Statistik Kota Banda Aceh.
- 1.6. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasil penelitian dan pengembangan.

#### **2. Kerjasama Pembangunan**

- 2.1. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga.

#### **3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

- 3.1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

#### **4. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar**

- 4.1. Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.
- 4.2. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang.

#### **5. Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 5.1. Penyusunan Rancangan RPJPD.
- 5.2. Penyusunan Rancangan RPJMD.
- 5.3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
- 5.4. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 5.5. Penyusunan Kebijakan Umum APBD.
- 5.6. Penyelenggaraan Musrena.
- 5.7. Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 5.8. Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran responsif gender (PPRG).

#### **6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

- 6.1. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

#### **7. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya**

- 7.1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan.
- 7.2. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan.
- 7.3. Grand Design Pembangunan Kependudukan.
- 7.4. Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

#### **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 – 2022, sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020:**

##### **Penunjang:**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 1.1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - 1.2.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - 1.2.2. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - 1.3.1. sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
  - 1.3.2. sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
  
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - 1.4.1. sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - 1.4.2. sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - 1.4.3. sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan.
  - 1.4.4. sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1.5.1. sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1.6.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.
  - 1.6.2. sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1.7.1. sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 1.7.2. Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
  - 1.7.3. sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

#### **Urusan Perencanaan:**

### **1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.**

- 1.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
  - 1.1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.

- 1.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.
- 1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- 1.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - 1.2.1. sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 1.3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - 1.3.1. Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
  - 1.3.2. sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

## **2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**

- 2.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
  - 2.1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - 2.1.2. sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- 2.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
  - 2.2.1. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - 2.2.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
  - 2.2.3. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

- 2.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
  - 2.3.1. sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - 2.3.2. sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
  - 2.3.3. sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

#### **Urusan Penelitian:**

##### **1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.**

- 1.1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
  - 1.1.1. sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial.
- 1.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan.
  - 1.2.1. sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah.
  - 1.2.2. sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.
  - 1.2.3. sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
  - 1.2.4. sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 1.3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
  - 1.3.1. sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
  - 1.3.2. sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

## **BAB III**

### **PROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA**

#### **3.1. Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2021**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKT Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2021 disusun sesuai dengan nomenklatur baru dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta merujuk pada Renstra Bappeda tahun 2017 - 2022. Adapun jumlah program yang dilaksanakan adalah 1 (satu) Program Penunjang, 2 (dua) program Perencanaan, dan 1 (satu) Program Penelitian. Seluruh program tersebut didukung oleh 15 (lima belas) kegiatan dan 35 sub kegiatan, yang secara detail sebagai berikut:

##### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Program penunjang yang merupakan pendukung internal Bappeda ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - 2.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - 2.2. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - 3.1. Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
  - 3.2. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - 4.1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - 4.2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - 4.3. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan.
  - 4.4. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 5.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.
  - 5.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 6.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 6.2. Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
  - 6.3. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.**

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
  - 1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
  - 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.
  - 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
  
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - 2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
  
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - 3.1 Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
  - 3.2 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

**c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- 1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- 1.2 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
  - 2.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - 2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
  - 2.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
  - 3.1. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - 3.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
  - 3.3. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

**d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.**

Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
  - 1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial.
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan.
  - 2.1 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah.
  - 2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.
  - 2.3 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
  - 2.4 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian.

3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

3.2 Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

Tabel 3.1 berikut ini menunjukkan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda di tahun 2021 serta tujuan dan sasaran yang ingin di capai.

**Tabel 3.1**  
**Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah</b>	<b>100%</b>
		1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	100%
		1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	13 Dokumen
		1.2 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%
		1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12 Bulan
		1.2.2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan
		1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
		1.3.1 Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	67 stel

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		1.3.2 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Pegawai
		1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100%
		1.4.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Jenis
		1.4.2 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Jenis
		1.4.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Jenis
		1.4.4 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	40 Laporan
		1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		1.5.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12 Bulan
		1.5.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		1.6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit
		1.6.2 Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	114 Unit
		1.6.3 Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	1 Unit
<b>Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif</b>	<b>Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD</b>	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	100%
		2.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	100%
		2.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	2 Jenis
		2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 Orang

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	2 Dokumen
		2.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	100%
		2.2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	3 Jenis
		2.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	100%
		2.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	2 Dokumen
		2.3.2 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	<b>Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD</b>	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%
		3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Dokumen
		3.1.2 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	50 Dokumen
		3.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.2.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	60 Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		3.2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	1 Laporan
		3.2.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen
		3.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen
		3.3.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional bidang infrastruktur	2 Laporan
		3.3.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	100%
		4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1 Dokumen
		4.1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian Sosial	1 Dokumen
		4.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	6 Dokumen
		4.2.1 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	2 Laporan
		4.2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup	2 Laporan
		4.2.3 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	1 Laporan
		4.2.4 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan pertanahan	1 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		4.3 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	2 Dokumen
		4.3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	2 Laporan
		4.3.2 Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	3 Laporan

### 3.2. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan, dan antara pimpinan instansi pemerintah unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah atau tanggung jawab. Dengan adanya penetapan kinerja, setiap individu maupun instansi diharapkan dapat mengelola program, kegiatan, dan sub kegiatan secara terarah sesuai target dan sasaran yang ingin di capai. Bappeda Kota Banda Aceh, menetapkan kinerja pada tahun 2021 dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan organisasi termasuk nilai anggaran yang tersedia.

Adapun total jumlah anggaran yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 12.372.380.505, dengan rincian belanja penunjang dan belanja pegawai sebesar Rp 7.126.072.055, belanja urusan perencanaan sebesar Rp 3.966.278.650, dan belanja urusan penelitian sebesar Rp 1.280.029.800. Berikut adalah rincian indikator kinerja dan alokasi anggaran per program pada Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2021:

**Tabel 3.2**  
**Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1 Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	82%
		1.2 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100% (44 OPD dari 44 OPD)
		1.3 Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	80% (16 Indikator dari 20 Indikator Program RPJMD)

**Tabel 3.3**  
**Alokasi Anggaran Bappeda Kota Banda Aceh per Program Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.126.072.055
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.148.976.450
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	817.302.200
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.280.029.800
<b>JUMLAH</b>		<b>12.372.380.505</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2021 menjabarkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai berikut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2021. Dokumen ini menjelaskan keterkaitan antara target kinerja Bappeda dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Banda Aceh. Keberhasilan pelaksanaan program kerja Bappeda akan mendukung percepatan pencapaian Visi Kota Banda Aceh khususnya melalui Misi kelima yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Dokumen ini juga menggambarkan kondisi sumber daya serta sarana dan prasarana pendukung yang merupakan aspek yang cukup penting bagi Bappeda dalam melaksanakan seluruh program kegiatan yang direncanakan. Dokumen RKT ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjadi bahan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021.

**A. Lampiran Rencana Strategis (RS) Tahun 2017-2020**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
				<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
					3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
					4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
					5 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
					6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					7 Penyediaan Makanan dan Minuman
					8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
					9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
					10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
				<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
					2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
					3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
					4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
				<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	1 Pengadaan Mesin Absensi
					2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
					3 Pengadaan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu
				<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif				
		<b>1 Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD</b>	Menyusun dokumen perencanaan yang partisipatif dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya	<b>1.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	1.1.1 Penyusunan Rancangan RPJPD
					1.1.2 Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh
					1.1.3 Penyusunan Rancangan RPJMD
		<b>2 Persentase OPD yang Renstranya selaras RPJMD</b>		<b>2.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	2.1.1 Penyusunan Kebijakan Umum APBD
				<b>2.2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	2.2.1 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
				<b>2.3 Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya</b>	2.3.1 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
					2.3.2 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
					2.3.3 Grand design pembangunan kependudukan
					2.3.4 Koordinasi dan Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		<b>3 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD</b>		<b>3.1 Program Kerjasama Pembangunan</b>	3.1.1 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
				<b>3.2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</b>	3.2.1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
				<b>3.3 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>	3.3.1 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi
					3.3.2 Koordinasi penyelesaian penyelesaian tata ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
				<b>3.4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	3.4.1 Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
		<b>4 Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target</b>		<b>4.1 Program Pengembangan Data/Informasi</b>	4.1.1 Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
					4.1.2 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
					4.1.3 Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
					4.1.4 Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)
					4.1.5 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
					4.1.6 Penyusunan Buku Statistik Banda Aceh dan Buku Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh
				<b>4.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	4.2.1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
		<b>5 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan</b>	Pemeliharaan database yang terkoneksi dengan OPD	<b>5.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	5.1.1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
					5.1.2 Penyelenggaraan Musrena

**B. Lampiran Rencana Strategis (RS) Tahun 2021-2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
				<b>1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				<b>1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				<b>1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				<b>1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	1.3.1 Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 1.3.2 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
				<b>1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	1.4.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					1.4.2 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					1.4.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
					1.4.4 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				<b>1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	1.5.1 Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				<b>1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	1.6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
					1.6.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
				<b>1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.7.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					1.7.2 Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
					1.7.3 Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif</b>	<b>Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif</b>	<b>Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD</b>	<b>Menyusun dokumen perencanaan yang partisipatif dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya</b>	<b>2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	
				<b>2.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	2.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
					2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
					2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
				<b>2.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	2.2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				<b>2.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	2.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
					2.3.2 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Persentase OPD yang Renja selaras dengan RKPK		<b>3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
				<b>3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	3.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					3.1.2 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				<b>3.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	3.2.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					3.2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
					3.2.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)
				<b>3.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	3.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)
					Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
					Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
		Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target		<b>4 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	
				<b>4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	4.1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
				<b>4.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan</b>	4.2.1 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah
					4.2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
					4.2.3 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
					4.2.4 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
				<b>4.3 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	4.3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
					4.3.2 Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

**C. Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah</b>	<b>100%</b>
		1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	100%
		1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	13 Dokumen
		1.2 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%
		1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12 Bulan
		1.2.2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan
		1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
		1.3.1 Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	67 stel

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		1.3.2 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Pegawai
		1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100%
		1.4.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Jenis
		1.4.2 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Jenis
		1.4.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Jenis
		1.4.4 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	40 Laporan
		1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		1.5.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12 Bulan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		1.5.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
		1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		1.6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit
		1.6.2 Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	114 Unit
		1.6.3 Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	1 Unit
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	100%
		2.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	100%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		2.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	2 Jenis
		2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 Orang
		2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	2 Dokumen
		2.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	100%
		2.2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	3 Jenis
		2.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	100%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		2.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	2 Dokumen
		2.3.2 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan
	<b>Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD</b>	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%
		3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		3.1.2 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	50 Dokumen
		3.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.2.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	60 Dokumen
		3.2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	1 Laporan
		3.2.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		3.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen
		3.3.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional bidang infrastruktur	2 Laporan
		3.3.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	100%
		4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1 Dokumen
		4.1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian Sosial	1 Dokumen
		4.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	6 Dokumen
		4.2.1 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	2 Laporan
		4.2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup	2 Laporan
		4.2.3 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	1 Laporan
		4.2.4 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan pertanahan	1 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		4.3 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	2 Dokumen
		4.3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	2 Laporan
		4.3.2 Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	3 Laporan





**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh**  
**Jl. Nyak Adam Kamil I No.19A Banda Aceh. Telp (0651) 32398**  
**e-mail: [bappeda.kotabandaaceh@gmail.com](mailto:bappeda.kotabandaaceh@gmail.com);**  
**Website: <https://bappeda.bandaacehkota.go.id>**